

Batugosok : Pemkab belum akan menghentikan penambangan

Labuan Bajo, Kompas - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, belum berencana menghentikan aktivitas penambangan emas di Batugosok, Kecamatan Komodo. Alasannya, karena kegiatan penambangan di lokasi yang berjarak sekitar 10 kilometer utara Labuan Bajo, ibu kota Manggarai Barat, itu masih dalam tahap eksplorasi.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemkab Manggarai Barat John Jajalu mengatakan hal itu di Labuan Bajo, Rabu (15/7). Ia dimintai tanggapan terkait pernyataan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Rachmat Witoelar, yang menyatakan akan merekomendasikan penghentian sementara tambang emas di Batugosok (Kompas, 15/7).

Menurut John Jajalu, Menneg LH terlalu cepat menyampaikan pernyataan menghentikan sementara penambangan Batugosok. "Kawasan Batugosok jaraknya sangat jauh dari Taman Nasional (TN) Komodo. Menteri Kehutanan rencananya besok (Kamis ini) meninjau lokasi untuk memastikan Batugosok di luar TN Komodo," tuturnya.

Kepala Balai TN Komodo Tamen Sitorus secara terpisah di Labuan Bajo menegaskan, lokasi Batugosok di luar kawasan TN Komodo. Oleh karena itu, kegiatan tambang emas di Batugosok merupakan urusan Pemkab Manggarai Barat. "Soal tambang emas di Batugosok itu bukan tanggung jawab Balai TN Komodo."

Ketua DPRD Manggarai Barat Matheus Hamsi sepakat dengan desakan Menneg LH untuk menghentikan sementara penambangan di Batugosok.

"Katanya kegiatan tambang ini baru eksplorasi, tetapi kalau melihat alat-alat berat dan aktivitasnya seperti sudah memasuki tahap eksploitasi. Saya setuju jika tambang Batugosok ditinjau ulang," ujarnya.

Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi NTT Frans Rihi di Kupang mengatakan, usaha tambang emas di Manggarai Barat tidak boleh dipaksakan kalau tidak didukung masyarakat setempat. Pemerintah bekerja melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan demi kepentingan kelompok tertentu.

Penyalahgunaan

Sementara itu, tiga narasumber asal Manggarai yang dihubungi secara terpisah, Rabu, menyebutkan, mencuatnya kasus tambang Batugosok adalah contoh penyalahgunaan kekuasaan rezim lokal akibat terputusnya konsultasi serta dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten. Masalah Batugosok tidak bakal berlarut hingga sekarang jika pemerintah pusat bertindak cepat dan tegas.

Ketiga narasumber itu adalah Boni Hargens Manggarai). "Masalah Batugosok bertele-tele seperti sekarang karena Jakarta lambat," kata Boni Hargens. (SEM/KOR/ANS)

(dosen ilmu politik Universitas Indonesia, yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Jakarta), Cypri Aoer (anggota DPR), dan Rofino Kant (pemerhati pariwisata di Ruteng,